#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA PASURUAN

www.perkim.pasuruankota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan ridho, rahmat, hidayah dan inayah-Nya semata, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini disusun berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pasuruan, 23 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Pasuruan

AKUNG NGVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 197211252003121006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan evaluasi kinerja dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance),* memuat rencana kerja, tingkat capaian, realisasi dari indikator-indikator sasaran yang ditempuh melalui strategi, kebijakan dan program pembangunan seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dapat dijelaskan secara umum capaian kinerja organisasi sesuai dengan PK Plt. Kepala Dinas periode Tahun 2021-2026, terdapat 1 tujuan yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan, dan terdiri atas 1 indikator kinerja utama yang dipergunakan sebagai tolak ukur dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

   Indikator Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung oleh kinerja 4 (empat) program, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Kawasan Permukiman, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

   Target kinerja indikator tujuan Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 adalah sebesar 88,50% dan realisasinya sebesar 89,02%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh terupdate-nya data PSU perumahan dan penyerahan PSU perumahan di TA 2025. Selain itu, adanya updating data aplikasi SPASI (Sistem Pemetaan Aset, Sarana

dan Infrastruktur) secara berkala, sehingga PSU Kawasan Permukiman yang layak meningkat.

Selain terdapat tujuan organisasi yang tercantum dalam PK Kepala Dinas periode Tahun 2021-2026, juga terdapat sasaran organisasi yakni Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman dengan 2 indikator kinerja utama dengan capaian sebagai berikut:

1. Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh

   Berdasarkan nomenklatur program dan kegiatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, indikator tersebut didukung oleh kinerja 4 (empat) program, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Permukiman, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

   Target kinerja indikator sasaran Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh Tahun 2025 adalah sebesar 90,08% dan realisasinya sebesar 93,40%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

2. Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak

   Indikator Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak didukung oleh 1 (satu) program kinerja, yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

   Target kinerja indikator sasaran Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak Tahun 2025 adalah sebesar 76,28% dan realisasinya sebesar 82,85%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

Sedangkan berdasarkan PK Plt. Kepala Dinas periode Tahun 2025-2029, terdapat 2 sasaran organisasi yakni sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dengan 1 indikator kinerja utama yakni Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak. Indikator Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak didukung oleh 1 program kinerja, yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

   Target kinerja indikator sasaran Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Tahun 2025 adalah sebesar 75,70% dan realisasinya sebesar 82,85%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.
2. Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh dengan 1 indikator kinerja utama yakni Persentase Bebas Kumuh. Berdasarkan nomenklatur program dan kegiatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, indikator tersebut didukung oleh kinerja 4 (empat) program, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengembangan Permukiman, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

   Target kinerja indikator sasaran Persentase Bebas Kumuh Tahun 2025 adalah sebesar 94,36% dan realisasinya sebesar 97,12%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

Ketercapaian Indikator Sasaran Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak (PK sebelum perubahan) dan Indikator Sasaran Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak (PK setelah perubahan) didukung

beberapa faktor. Terkait kegiatan pembangunan/peningkatan PSU perumahan faktor yang mendukung tercapainya indikator tersebut antara lain: penyedia yang tepat, koordinasi yang baik antara pemberi kerja, perencana, pengawas dan penyedia. Terkait kegiatan pemeliharaan PSU perumahan, faktor yang mendukung tercapainya indikator tersebut yaitu bahan atau material yang tersedia, tenaga lapangan yang bekerja dengan baik sesuai tupoksi. Terkait kegiatan penyerahan PSU perumahan, faktor yang mendukung tercapainya indikator tersebut antara lain: koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Penyerahan, Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan, selain itu ketercapaian program PSU didukung oleh pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU. Dan yang terakhir adalah karena terupdate-nya data PSU perumahan dan updating data aplikasi SPASI (Sistem Pemetaan Aset, Sarana dan Infrastruktur) secara berkala, sehingga PSU Kawasan Permukiman yang layak meningkat.

Ketercapaian Indikator Sasaran Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh (PK sebelum perubahan) dan Indikator Sasaran Persentase Bebas Kumuh (PK setelah perubahan) terbilang sangat tinggi dikarenakan adanya penanganan di kawasan kumuh terkait pembangunan jalan paving dan drainase, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan akses air minum yang layak, serta pengelolaan air limbah.

Untuk mendukung keberhasilan indikator sasaran tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan melaksanakan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terdiri dari kegiatan pengembangan sarana prasarana kawasan permukiman tematik, kegiatan perencanaan, monev dan pengendalian kawasan permukiman, kegiatan pembangunan sarana prasarana permukiman; kegiatan

peningkatan sarana prasarana permukiman; kegiatan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman dan kegiatan pemeliharaan dan operasional rutin Tempat Pemakaman Umum.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Keberhasilan kinerja Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak, menghasilkan outcome sebesar 97,47% dari target 94,92% atau capaian indikator 100%. Angka tersebut didukung oleh kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan 2 sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dan Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan.

Terkait pembangunan sarana prasarana permukiman menghasilkan output jumlah lokasi PSU yang dilaksanakan perbaikan sebanyak 20 lokasi dari target 20 lokasi atau capaian indikator 100 persen. Ketercapaian tersebut didukung dengan optimalisasi ketersediaan anggaran, adanya peningkatan PSU yang cukup memadai, dan peningkatan peran masyarakat dalam mengajukan usulan pembangunan yang dibutuhkan melalui musrenbang kelurahan. Hasil usulan tersebut ditindaklanjuti ke musrenbang kecamatan, forum pemangku kepentingan PD hingga musrenbang tingkat kota yang menghasilkan keputusan prioritas kegiatan serta peran konsultan perencana, kontraktor dan konsultan pengawas dalam melaksanakan paket pekerjaan sesuai proses pengadaan.

Selain itu, terdapat program lain yang menunjang indikator sasaran tersebut, yakni Program Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani,

dimana jumlah rumah yang diperbaiki pada Tahun 2025 adalah sebesar 300 unit rumah dari target 300 unit rumah. Ketercapaian perbaikan rumah tersebut dikarenakan adanya penerima bantuan yang tertib administrasi dan kerjasama yang baik antara penerima bantuan, penyedia, dan pihak terkait lainnya.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum juga menjadi salah satu program yang menunjang indikator sasaran tersebut, yang menghasilkan outcome sebesar 89,02% dari target 97,90% atau capaian indikator 90,93%. Ketidaktercapaian program ini dikarenakan realisasi rumah tangga yang terlayani akses air minum yang aman lebih kecil dari target yang telah direncanakan dan beberapa SR tidak memungkinkan dibangun karena tidak ada jaringan distribusi, sehingga tidak memenuhi target awal pembangunan.

Terakhir, terdapat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang menghasilkan outcome sebesar 91,68% dari target 93,27% atau capaian indikator sebesar 98,30%. Ketidaktercapaian program ini disebabkan adanya efisiensi paket septik individu DAU pada tahun 2024, dari 6 paket menjadi 1 paket septik individu purworejo sehingga hanya 190 SR dari target awal 547 SR.

Adapun hambatan yang diperoleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan program kegiatannya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Data BNBA PDAM tidak akurat, beberapa SR tidak memungkinkan di bangun SR PDAM karena tidak ada bangunan sehingga tidak memenuhi target awal pembangunan;
2. Pembagian tim operasional dan pemeliharaan Air Limbah belum maksimal;
3. Masih kurangnya promosi program sedot tinja;
4. Penyusunan SPJ dari KSM membutuhkan waktu;

5. Penyaluran perlu reviu inspektorat sehingga membutuhkan waktu;
6. Proses perijinan dan pemenuhan dokumen pengajuan tapak perlu beberapa waktu;
7. Adanya warga yang tidak konsisten dengan penggunaan dana upah tukang;
8. Adanya penyesuaian SK penerima bantuan RTLH;
9. Nota dan kwitansi pembelian bahan tidak tersimpan dengan baik;
10. Kurangnya pemahaman masyarakat akan tujuan rencana tapak dan penyerahan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota Pasuruan;
11. Koordinasi rumit dan kurangnya dukukan masyarakat di lokasi proyek;
12. Kurangnya koordinasi pelaksana dengan dinas/ masyarakat;
13. Kurangnya pengawasan pelaksanaan fisik;
14. Banyaknya PSU kawasan permukiman yang telah dibangun di atas tanah masyarakat;
15. Kurang maksimalnya penyampaian informasi dari ketua RT dan RW setempat kepada masyarakat terkait pentingnya legalitas status tanah di bawah jalan dan saluran, sehingga di beberapa lokasi masih dijumpai permasalahan;
16. Ketidakkonsistenan masyarakat dalam kesepakatan perencanaan pembangunan;
17. Adanya perubahan nomenklatur peraturan terkait batas nominal pengadaan langsung konstruksi;
18. Beberapa lokasi pembangunan terkendala status aset tanah di bawah jalan dan saluran yang masih menjadi hak milik masyarakat dan tidak bersedia menyerahkan kepada pemkot; dan

19. Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar mereka, sehingga tingkat ketergantungan kepada pemkot relatif tinggi.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk perbaikan di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. PDAM diharapkan dapat melakukan updating data BNBA untuk usulan perluasan SPAM tahun selanjutnya;
2. Optimalisasi jadwal dan pembagian tugas tim agar operasional dan pemeliharaan lebih efektif;
3. Promosi yang lebih massif;
4. Menghimbau langkah-langkah percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik agar bisa selesai tepat waktu;
5. Koordinasi dengan KSM serta kelurahan lebih intensif;
6. Pengawasan dalam tertib administrasi;
7. Pengajuan tapak sesuai dengan prosedur;
8. Perlunya pengawasan pemenuhan dan pengurusan perijinan sehingga prosesnya sesuai timeline;
9. Monitoring pembangunan fisik RTLH;
10. Himbauan tertib administrasi;
11. Memberikan timeline yang jelas untuk penyelesaian dokumen SPJ;
12. Memberikan sosialisasi dan konsultasi kepada pemohon rencana tapak;
13. Menghimbau pengembang yang sudah memenuhi syarat untuk segera melaksanakan penyerahan PSU perumahan;
14. Menjalin koordinasi yang baik dan pemaparan informasi yang jelas terkait pelaksanaan fisik kepada masyarakat;
15. Menampung aspirasi masyarakat dalam proses pelaksanaan fisik;
16. Pendampingan tim teknis dalam pelaksanaan pekerjaan fisik;
17. Identifikasi lanjut hasil kesepakatan status tanah di bawah jalan dan saluran;

18. Koordinasi aktif dengan BPKA dan BPN terkait prosedur penyerahan sebagian hak atas tanah masyarakat kepada Pemkot sebagai PSU kawasan permukiman;
19. Sosialisasi kepada masyarakat penerima pembangunan;
20. Koordinasi aktif dengan BPBJ terkait pelaksanaan lelang/ tender paket konstruksi; dan
21. Koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan mereka.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi 3
1.2.1 Isu Strategis 3
1.2.2 Dukungan SDM 6
1.2.3 Sarana dan Prasarana 8
1.2.4 Anggaran 12
1.3 Dasar Hukum 13
1.4 Sistematika Laporan Kinerja 14
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 15
1.6 Langkah Perbaikan Internal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA 18
2.1 Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 18
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 26
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 27
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 45
3.1 Capaian Kinerja 45
3.1.1 Skala Capaian Kinerja 45
3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi

Tahun Pelaporan 45
3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir 56
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 61
3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/ Kota Lain 63
3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan 65
3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 69
3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 71
3.2 Realisasi Anggaran 79
3.3 Inovasi 82
3.4 Penghargaan 82
BAB IV PENUTUP 85
4.1 Kesimpulan 85
4.2 Rekomendasi 90
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Berdasarkan Jenis Kelamin 6

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 7

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Berdasarkan Golongan 8

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 9

Tabel 1.5 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025 13

Tabel 1.6 Rencana Aksi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 16

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun Periode Rencana Strategis (2021-2026) Sebelum Perubahan 21

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun Periode Rencana Strategis (2025-2029) Setelah Perubahan 21

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

	Tahun 2025 (Berdasarkan Renstra Periode Tahun 2021-2026)	23
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 (Berdasarkan Renstra Periode Tahun 2025-2029)	25
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan	27
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 (Berdasarkan Renstra Periode 2021-2026)	28
Tabel 2.7	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025	29
Tabel 2.8	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025	36
Tabel 2.9	Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025	37
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	45
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	46
Tabel 3.3	Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2025	48
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029	49
Tabel 3.5	Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2025	51
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja	56
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	

yang Terdapat pada Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Periode Tahun 2021-2026 dan Periode Tahun 2025-2029 ... 62
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Pengurangan Kumuh Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ... 63
Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 66
Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 69
Tabel 3.11 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan (PK Sebelum Perubahan-Renstra Periode 2021-2026) 71
Tabel 3.12 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan (PK Setelah Perubahan-Renstra Periode 2025-2029) 76
Tabel 3.13 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 80
Tabel 3.14 Penghargaan/ Capaian Keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 83
Tabel 4.1 Rekapitulasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2025 (Renstra Periode 2021-2026) 86
Tabel 4.2 Rekapitulasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2025 (Renstra Periode 2025-2029) 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*) merupakan salah satu tuntutan publik pada saat ini, dimana menuntut aparatur pemerintah untuk melaksanakannya dalam usaha mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah melalui aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga ikut andil berperan serta dalam pembangunan daerah tersebut. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa asas akuntabilitas merupakan asas yang paling utama, yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu Tahun dalam bentuk laporan yaitu laporan kinerja Tahunan, dimana berisi tentang ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Informasi yang disajikan adalah tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan Tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) Tahunan yang direncanakan, sehingga LKjIP tersebut dapat dijadikan dasar dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pada Tahun yang akan datang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025, merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan kawasan permukiman diantaranya:

1. Terbatasnya pemenuhan kebutuhan rumah (backlog) yang layak dan terjangkau;

2. Permasalahan pokok air bersih yang meliputi belum optimalnya tingkat pelayanan air minum di perkotaan dan daerah rawan air; dan
3. Permasalahan pokok air limbah dengan masih terbatasnya tingkat layanan pengolahan sistem air limbah terpusat (system sewerage) serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal ini dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah;

Mengingat permasalahan-permasalahan pokok tersebut di atas, maka dalam hal ini masih diperlukan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan menyesuaikan tingkat keberfungsiannya perumahan dan kawasan permukiman dikarenakan secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas khususnya menyangkut terpenuhinya kebutuhan dasar untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, sehingga penanganan bidang perumahan dan kawasan permukiman disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang realistis serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat nasional.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dirumuskan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan periode 2021-2026 dan periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Masih diperlukannya pengembangan dan pengelolaan air limbah serta perluasan akses air minum yang layak;
2. Pemenuhan kebutuhan akan rumah tidak layak huni yang masih belum maksimal;

3. Belum terfokusnya pembangunan infrastruktur pada kawasan kumuh (lokasi pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mengacu pada SK kumuh);
4. Belum optimalnya penyediaan Infrastruktur Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
5. Belum optimalnya Pengarusutamaan Gender di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, khususnya dalam hal pembinaan dan pendampingan terkait PSU, RTLH, dan pengelolaan Rusunawa serta IPLT.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 22 B Pasuruan yang terbentuk sebagaimana dinamika perkembangan regulasi yang ada diantaranya, Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, berdasarkan peraturan tersebut tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah "*Membantu Wali Kota Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan,"* dengan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan perencanaan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;

d. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
f. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
h. Pembinaan terhadap UPT; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan:

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

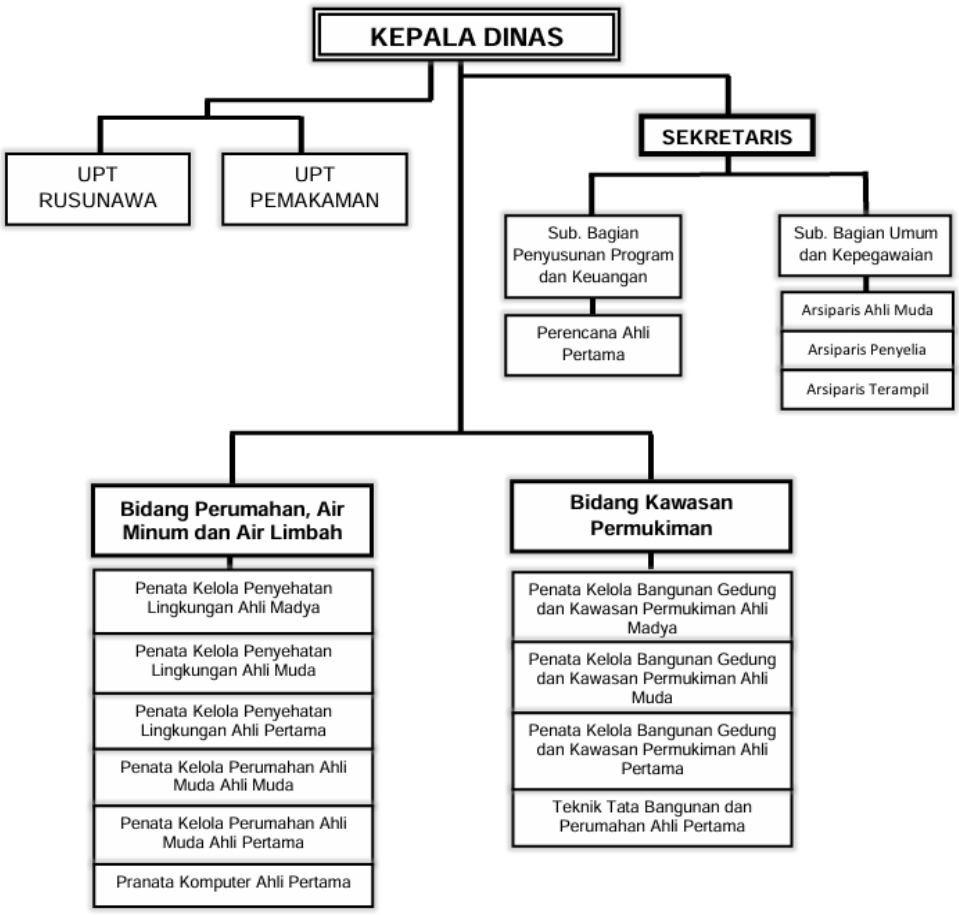

Sumber: 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

1.2.2 Dukungan SDM

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan telah didukung Sumber Daya Manusia yang memadai dan profesional sesuai dengan kompetensi dan tuntutan tugas yang diperlukan.

a. Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 151 orang. Jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah pegawai ASN paling banyak adalah laki-laki sebanyak 129 orang, sedangkan perempuan sebanyak 22 orang. Adapun komposisi pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bidang	Jenis Kelamin (Orang)		Total (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	13	5	18
2	Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah	25	7	32
3	Bidang Kawasan Permukiman	33	6	39
4	UPT. Rusunawa	21	2	23
5	UPT. Pemakaman	37	2	39
Total (Orang)		129	22	151
Persentase (%)		85%	15%	100%

Sumber: 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

b. Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah terbanyak pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah SD sebanyak 89 orang, kemudian S1 sebanyak 24

orang, SMA sebanyak 22 orang, serta D3 dan S2 sebanyak 8 orang. Jumlah pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bidang	Pendidikan (Orang)					Total (Orang)
		SD	SMA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	2	4	3	6	3	18
2	Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah	18	2	2	9	1	32
3	Bidang Kawasan Permukiman	26	4	2	4	3	39
4	UPT. Rusunawa	15	5	0	2	1	23
5	UPT. Pemakaman	28	7	1	3	0	3
Total (Orang)		89	22	8	24	8	151
Persentase (%)		59%	15%	5%	16%	5%	100%

Sumber: 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

c. Pegawai ASN Berdasarkan Golongan

Pegawai ASN terdiri dari pegawai PNS dan PPPK. Berdasarkan golongan, pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan terbanyak adalah PPPK Paruh Waktu sebanyak 107 orang, PNS golongan III sebanyak 21 orang, golongan II sebanyak 9 orang, dan selanjutnya golongan IV sebanyak 4 orang. Kemudian terdapat PPPK golongan I dan IX sebanyak 4 dan golongan V sebanyak 2 orang, yang akan dijabarkan pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
Berdasarkan Golongan

No	Bidang	Golongan (Orang)							Total (Orang)
		II	III	IV	I	V	IX	Paruh Waktu	
		PNS			PPPK				
1	Sekretariat	5	4	2	0	0	2	5	18
2	Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah	1	8	1	2	1	1	18	32
3	Bidang Kawasan Permukiman	2	5	1	2	1	1	27	39
4	UPT. Rusunawa	1	2	0	0	0	0	21	23
5	UPT. Pemakaman	1	2	0	0	0	0	36	39
Total (Orang)		9	21	4	4	2	4	107	151
Persentase (%)		6%	14%	3%	3%	1%	3%	71%	100%

Sumber: 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

1.2.3 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pasuruan
Tahun 2025

No	Sarpras	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	A.C. Split	Unit	24		2	26
2	Alat Dapur Lainnya	Unit			1	1
3	Alat Kantor Lainnya	Unit	8			8
4	Alat Pemadam/*Portable*	Unit	18			18
5	Alat Pembersih Lainnya	Unit	1			1
6	Alat Penghancur Kertas	Unit	2			2
7	Alat Studio Video Lainnya	Unit	1			1
8	Alat Ukur Lainnya Lainnya (Dst)	Unit	1			1
9	Alat Ukur *Universal* Lainnya (Dst)	Unit	1			1
10	*Brankas*	Unit	1			1
11	*Buffet* Kaca	Unit	1			1
12	*Camera Electronic*	Unit	2			2
13	*Camera* Video	Unit	3			3
14	CCTV - *Camera Control Television System*	Unit	9			9
15	*Concreta Mixer*/Penumbuk Beton	Unit	1			1
16	Digital Multimeter (Alat Ukur *Universal*)	Unit	2			2
17	Dispenser	Unit	4			4
18	*Exhause Fan*	Unit	2			2
19	*Faximile*	Unit	1			1
20	*Filing Cabinet* Besi	Unit	12			12
21	*Focusing Screen*/Layar Lcd Projector	Unit	1			1
22	Gergaji *Chain Saw*	Unit	4			4
23	Gerobak Dorong	Unit	3			3
24	*Global Positioning System*	Unit	7			7

No	Sarpras	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
25	*Gordyin*/Kray	Unit	14		91	105
26	*Handy Talky* (HT)	Unit	2		4	6
27	Karpet	Unit	6			6
28	Kasur/*Spring Bed*	Unit	1			1
29	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya (Dst)	Unit	11			11
30	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya (Dst)	Unit	1			1
31	Kipas Angin	Unit			2	2
32	Kursi Biasa	Unit	211		4	215
33	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	1			1
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	5		1	6
35	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	Unit	3			3
36	Kursi Lipat	Unit	15		19	34
37	Kursi Putar	Unit	29		4	33
38	Kursi Rapat	Unit	87		1	88
39	Kursi Tamu	Unit	12			12
40	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat Eselon II	Unit	1			1
41	Lampu	Unit	12			12
42	Lap Top	Unit	19			19
43	Layar Film/Projector	Unit	1			1
44	Lemari Besi/Metal	Unit	8			8
45	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	Unit	2			2
46	Lemari Es	Unit	1			1
47	Lemari Kayu	Unit	140	1		141
48	Lemari Sorok	Unit	3			3
49	*Loudspeaker*	Unit	1			1
50	Meja Kerja Kayu	Unit	65		3	68
51	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	8			8

No	Sarpras	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Kurang Baik	Kurang Baik	
52	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	5			5
53	Meja Makan Kayu	Unit	60		10	70
54	Meja Rapat	Unit	3			3
55	Meja Tamu Biasa	Unit	65			65
56	Mesin Absensi	Unit	1			1
57	Mesin Gergaji	Unit	5			5
58	Mesin Las Listrik	Unit	1			1
59	Mesin Pemotong Rumput	Unit	11		4	15
60	Mesin Penghisap Debu/ *Vacuum Cleaner*	Unit	1			1
61	Mesin Penghitung Uang	Unit			1	1
62	*Microphone/ Wireless Mic*	Unit	1			1
63	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)	Unit	1			1
64	Mobil Tinja	Unit	1			1
65	*Note Book*	Unit			2	2
66	P.C Unit	Unit	27		2	29
67	Papan Pengumuman	Unit	1			1
68	Papan Visual/Papan Nama	Unit	11		2	13
69	Penyemprot Mesin *(Power Sprayer)*	Unit	9			9
70	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya (dst)	Unit	1			1
71	Personal Komputer Lainnya	Unit	1			1
72	*Pick Up*	Unit	7			7
73	Pompa Air	Unit	7		1	8
74	*Portable Generating Set*	Unit	4			4
75	*Portable Water Pump*	Unit	1			1
76	*Printer* (Peralatan Personal Komputer)	Unit	12		8	20
77	Rak Besi	Unit	21			21
78	Rak Kayu	Unit	6			6

No	Sarpras	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	Kurang Baik	Kurang Baik	
79	Rambu-Rambu Petunjuk/Penuntun	Unit	8			8
80	*Scafolding Set & Tool*	Unit	1			1
81	*Scanner* (Peralatan Personal Komputer)	Unit	2		1	3
82	Sepeda Motor	Unit	11	1		12
83	Sofa	Unit	64		8	72
84	*Sound System*	Unit	2			2
85	*Stamper*	Unit	1			1
86	*Station Wagon*	Unit	1	1		2
87	*Stationary Generating Set*	Unit	1			1
88	*Submersible Pump*	Unit	3			3
89	Tablet PC	Unit	1			1
90	Tangga Aluminium	Unit	7			7
91	Telephone (PABX)	Unit	1			1
92	Televisi	Unit	5		1	6
93	Tempat Tidur Kayu	Unit	96		14	110
94	Tenda	Unit	8			8
95	*Termometer Standar*	Unit	5			5
96	Treng Air/Tandon Air	Unit	2			2
97	*Unit Power Supply*	Unit	3			3
98	*Water Pas*	Unit	2			2
Total			1.260	3	186	1.449

Sumber: 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

1.2.4 Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan didukung oleh anggaran pada awal Tahun sebesar Rp39.641.669.262,- kemudian mengalami pergeseran dan perubahan anggaran menjadi sebesar Rp37.182.592.572,- yang bersumber dari APBD. Berikut adalah

besaran anggaran Tahun 2024 dan anggaran Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan:

Tabel 1.5
Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah (Rp)
APBD	2024	Rp52.023.721.760,-
APBD	2025	Rp39.641.669.262,-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang RPJMD 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
16. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama *(strategic issue)* yang sedang dihadapi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 telah direkomendasikan agar:

1. Menyajikan data kinerja yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan pada setiap variabel indikator kinerja untuk mengukur capaian kinerja;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara memadai untuk memantau progres capaian kinerja Tujuan Perangkat Daerah.

Adapun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi LHE SAKIP 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1.6
Rencana Aksi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
Tahun 2025

No	Rekomendasi LHE	Rencana Aksi
1	Menyajikan data kinerja yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan pada setiap variabel indikator kinerja untuk mengukur capaian kinerja	Sebagaimana hasil rapat koordinasi Kepala Dinas dengan Bidang dan UPT terkait, dapat disajikan data kinerja pada setiap variabel indikator kinerja setiap triwulan sebagaimana terlampir
2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara memadai untuk memantau progres capaian kinerja Tujuan Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan terkait capaian kinerja perangkat daerah agar dapat memantau progres capaian kinerja Tujuan Perangkat Daerah tersebut di atas

1.6 Langkah Perbaikan Internal Perangkat Daerah atas Rekomendasi LKjIP 2024

Adapun Rekomendasi LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja). Dengan adanya rekomendasi tersebut, maka langkah perbaikan yang perlu dilakukan

adalah dengan melakukan koreksi terhadap capaian kinerja OPD dengan membandingkan capaian kinerja pada level Lembaga di atasnya pada dokumen LKjIP OPD sebagai pedoman untuk acuan perbaikan ke depannya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja 5 Tahun Terakhir Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode lima Tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis (Renstra) PD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan program yang realistis untuk kurun waktu lima Tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari satu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan selama 5 (lima) Tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, tujuan yang dirumuskan untuk mencapai visi,

melaksanakan visi, memecahkan masalah, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang menjadi fungsi/bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang selaras dengan fungsi/bidang kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Periode Tahun 2021-2026 adalah "Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup." Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan juga turut mendukung pencapaian Visi Misi Walikota Pasuruan. Adapun Visi Walikota Pasuruan periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya".

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka diperlukan misi pembangunan, yang mana dalam periode tahun 2021-2026 ini terdapat 4 misi pembangunan. Dalam hal ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan mendukung misi walikota yang kedua yakni Membangun Kota yang Indah dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan.

Dengan pernyataan tersebut, maka ditetapkan tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yakni:

"*Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak.*"

Pada Tahun 2024, tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan telah mengalami perubahan menjadi:

"Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan."

Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian yang lebih terarah dan menyeluruh secara makro sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan sebagai dasar membuat rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka perlu dirumuskan sasaran perangkat daerah untuk tujuan yang telah ditetapkan. Adanya perubahan tujuan dinas tersebut juga berimplikasi terhadap perubahan indikator tujuan, yang semula "*Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman,*" pada Tahun 2024 menjadi *"Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman."*

Untuk mendukung terwujudnya tujuan sebagai dasar membuat rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Pasuruan, maka diperlukan penetapan rumusan sasaran perangkat daerah. Adapun sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman."

Yang mempunyai indikator sasaran yaitu:

1. Persentase Rumah Layak Huni;
2. Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh pada Tahun 2022, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan pada Tahun 2023. Perubahan tersebut hanya berupa perubahan diksi saja, sehingga untuk target per Tahunnya bernilai sama.

Dikarenakan pada Tahun 2024 tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalami penyesuaian, maka sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga mengalami perubahan. Adapun sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setelah disesuaikan menjadi:

"Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman"

Yang mempunyai indikator sasaran yaitu:

1. Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh; dan
2. Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak

Dapat dijelaskan Tujuan dan Sasaran beserta Indikator pada BAB IV Renstra Perangkat Daerah yang dituangkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
Tahun Periode Rencana Strategis (2021-2026)
Sebelum Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak		Persentase Kawasan Permukiman yang Layak	60,44 %	62,30 %	64,30 %	66,30 %	68,29 %	70,28 %
2		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	97,07 %	97,45 %	97,84 %	98,22 %	98,61 %	98,99 %
			Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh (s/d Tahun 2022)	47,04 %	37,35 %	13,14 %	0%	0%	0%
			Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan (Tahun 2023)	47,04 %	37,35 %	13,14 %	0%	0%	0%

Sumber: Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Periode 2021-2026

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
Tahun Periode Rencana Strategis (2021-2026)
Setelah Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	88,35 %	88,50 %	88,65 %
2		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	-	-	-	88,71 %	90,08 %	91,46 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Permukiman	Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	-	-	-	74,44 %	76,28 %	76,28 %

Sumber: Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Periode 2021-2026

Dikarenakan Tahun 2025 merupakan masa transisi kepemimpinan kepala daerah, maka disusunlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang baru sesuai dengan visi misi kepala daerah yang baru. Sejalan dengan visi RPJMN 2025-2029, visi Walikota Pasuruan periode tahun 2025-2029 adalah:

PASURUAN KOTA ANUGRAH "Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya"

Dalam mewujudkan visi tersebut, terdapat 5 misi pembangunan Kota Pasuruan, yang mana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan mendukung misi walikota yang ke-empat yakni Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berorientasi pada Peran Kepemudaan, Kebudayaan dan Harmonisasi Sosial dan misi ke-lima yakni Mewujudkan Kota yang Indah dan Nyaman melalui Penguatan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkelanjutan.

Sebagaimana pergantian kepala daerah periode 2025-2029 tersebut, maka tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu:

"Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman" dengan indikator tujuan, Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan sebagai dasar membuat rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Pasuruan, maka diperlukan penetapan rumusan sasaran perangkat daerah. Adapun sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh, dengan indikator sasaran Persentase Bebas Kumuh; dan
2. Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak, dengan indikator sasaran Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 (Awal Tahun) berdasarkan Renstra Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025
(Berdasarkan Renstra Periode Tahun 2021-2026)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Tujuan: Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	Merupakan parameter yang dapat digunakan untuk mengukur layanan infrastruktur di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang meliputi pengelolaan sistem air minum, pengelolaan sistem air limbah, PSU Perumahan dan PSU Permukiman	(10% x Realisasi Indikator Kinerja Program PSU Perumahan) + (30% x Realisasi Indikator Kinerja Program PSU Kawasan Permukiman) + (30% x Realisasi Indikator Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum) + (30% x Realisasi Indikator Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	%	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh merupakan capaian atas luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan indikasi luas kawasan permukiman kumuh yang berkurang/menurun	(Luas Kawasan Permukiman – Luas Kawasan Kumuh) / Luas Kawasan Permukiman x 100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	%	Prasarana, Sarana dan Utilitas atau disingkat PSU; adapun persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak merupakan capaian atas penanganan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman. Dikarenakan wilayah permukiman lebih luas dibandingkan wilayah perumahan, maka diasumsikan bahwa Luas PSU Permukiman memiliki komponen nilai 65%, sedangkan Luas PSU Perumahan memiliki komponen nilai 35%	(Luas PSU Perumahan dan Permukiman – Luas PSU Perumahan dan Permukiman yang Tidak Layak) / Luas PSU Perumahan dan Permukiman x 100% Dengan menggunakan komponen Persentase Program PSU Perumahan sebesar 35% dan Persentase Program PSU Permukiman sebesar 65%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

Dikarenakan adanya Renstra periode 2025-2029 berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang baru, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025
(Berdasarkan Renstra Periode 2025-2029)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur layanan infrastruktur di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun formulasi perhitungannya menggunakan komponen persentase dari PSU Perumahan, PSU Permukiman, Air Minum, dan Air Limbah	(10% x Realisasi Indikator Kinerja Program PSU Perumahan) + (30% x Realisasi Indikator Kinerja Program PSU Kawasan Permukiman) + (30% x Realisasi Indikator Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum) + (30% x Realisasi Indikator Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Sasaran 1: Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh	Persentase Bebas Kumuh	%	Merupakan luasan kawasan yang dinyatakan tidak kumuh (berdasarkan SK) sesuai 7 indikator kumuh. Persentase ini diperoleh dari perhitungan luas kota dikurangi luas kawasan kumuh terupdate dibagi luas kota	Luas Kota - Luas Kawasan Kumuh ---------- X 100% Luas Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
3	Sasaran 2: Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	%	PSU adalah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang layak merupakan capaian atas penanganan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman Dikarenakan wilayah permukiman lebih luas dibandingkan wilayah perumahan, maka diasumsikan bahwa Luas PSU Permukiman memiliki komponen nilai 65%, sedangkan Luas PSU Perumahan memiliki komponen nilai 35%.	(35% x Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak) + (65% x Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Perencanaan kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Periode Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Periode Tahun 2021-2026 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan situasi/kondisi riil daerah dan adanya kebijakan lokal,

regional dan nasional. Dapat dijelaskan Tujuan dan Sasaran beserta Indikator selaras dengan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang dituangkan pada Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	88,50
2		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	%	90,08
			Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	%	76,28

Sumber: Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan *supervise* atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2025 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Periode Tahun 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi 1 (satu) sasaran strategis sebagai berikut:

"Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman".

Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	88,50%
2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	90,08%
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	76,28%

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Program	Anggaran
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp928.232.100,-
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp4.229.722.420,-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.125.514.841,-
4.	Program Pengembangan Perumahan	Rp1.387.298.200,-
5.	Program Kawasan Permukiman	Rp5.651.722.800,-
6.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp20.184.565.172,-
	TOTAL	Rp39.507.055.533,-

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan melaksanakan Program dan Kegiatan dengan pagu awal Tahun anggaran sebesar Rp39.507.055.533,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang kemudian dilakukan perubahan anggaran menjadi sebesar Rp37.182.592.572,00,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 (terlampir). Tabel 2.7 berikut adalah rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan:

Tabel 2.7
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
I	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Air Minum yang Aman	97,90%

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
A	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*	*356 Rumah Tangga*
1	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	356 SR
II	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Limbah yang Memadai	93,27%
B	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Pembuangan ALD (Septictank) Memadai*	*300 Rumah Tangga*
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	36 Unit
3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	270 Rumah Tangga
4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200 Orang
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100%
C	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu*	*100%*
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
D	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu*	*100%*
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ Bulan

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan
E	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu*	*100%*
9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
F	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya*	*100%*
11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen
G	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran*	*100%*
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
16	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
H	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran*	*100%*
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
I	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*	*100%*
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit
IV	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Backlog Rumah yang Ditangani	84,07%
J	*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	*Persentase MBR yang Terfasilitasi Rusunawa*	*80,74%*
26	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	3 Laporan
27	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah	2 Dokumen

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Khusus	
V	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	21,65%
K	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani*	*84,76%*
28	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	300 Unit Rumah
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan
VI	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak	41,65%
		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	94,92%
L	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara*	*130 PSU*
		Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara	*50 PSU*
30	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen
31	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	45 Lokasi
32	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan
33	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	30 Lokasi

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
34	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100 Lokasi

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
A	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota*	*Rp928.232.100,-*
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp928.232.100,-
B	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Rp4.229.722.420,-*
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp653.467.320,-
3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp3.361.673.000,-
4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp214.582.100,-
C	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Rp16.832.300,-*
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp4.172.900,-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp12.659.400,-
D	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Rp5.617.719.541,-*
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.573.162.041,-
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp44.557.500,-
E	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Rp96.417.900,-*
9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp6.349.100,-
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp90.068.800,-
F	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Rp3.558.400,-*
11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp3.558.400,-

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
G	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Rp275.809.800,-*
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp8.010.000,-
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp73.010.500,-
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp12.000.000,-
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp4.814.400,-
16	Penyediaan Bahan/Material	Rp9.976.500,-
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp18.010.000,-
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp149.988.400,-
H	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Rp555.326.400,-*
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.000.000,-
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp82.813.600,-
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp467.512.800,-
I	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Rp559.850.500,-*
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp43.770.000,-
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp257.070.000,-
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp38.152.500,-
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp220.858.000,-
J	*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	*Rp1.387.298.200,-*
26	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Rp14.120.000,-
27	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp1.373.178.200,-
K	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Rp5.651.722.800,-*
28	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp5.554.681.100,-
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp97.041.700,-

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
L	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Rp20.184.565.172,-*
30	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp203.928.200,-
31	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp3.370.398.320,-
32	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp219.838.000,-
33	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp13.371.578.100,-
34	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Rp3.018.822.552,-
	TOTAL	Rp39.507.055.533,-

Dalam perjalanannya, Perjanjian Kinerja mengalami beberapa perubahan, dikarenakan Tahun 2025 merupakan masa transisi kepemimpinan kepala daerah, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yang baru sesuai dengan visi misi kepala daerah dan dokumen perencanaan yang baru. Berdasarkan Renstra 2025-2029 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025, maka Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Sasaran 1: Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	75,70%
2	Sasaran 2: Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh	Persentase Bebas Kumuh	94,36%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Program	Anggaran
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp918.557.900,-
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp4.090.294.420,-
3.	Program Kawasan Permukiman	Rp5.634.499.700,-
4.	Program Pengembangan Perumahan	Rp1.358.162.372,-
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp18.416.070.073,-
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.765.008.107,-
	TOTAL	Rp37.182.592.572,-

Dengan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
I	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Air Minum yang Aman	97,90%
A	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*	*330 Rumah Tangga*
1	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	330 SR
II	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Limbah yang Memadai	93,27%
B	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Sarana Pembuangan ALD (Septictank) Memadai*	*245 Rumah Tangga*
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	34 Unit
3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki	245 Rumah Tangga

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(SPALD) Setempat	Septik Sesuai dengan Standar	
4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200 Orang
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan yang Terfasilitasi	100%
C	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu*	*100%*
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
D	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu*	*100%*
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ Bulan
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17 Laporan
E	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu*	*100%*
9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
F	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase SDM Aparatur yang Meningkat Kompetensinya*	*100%*

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen
G	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran*	*100%*
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
16	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
H	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran*	*100%*
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
I	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*	*100%*

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit
IV	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Backlog Rumah yang Ditangani	84,07%
J	*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	*Persentase MBR yang Terfasilitasi Rusunawa*	*80,74%*
26	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	3 Laporan
27	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen
V	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	21,65%
K	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Persentase RTLH pada Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani*	*84,76%*
28	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	300 Unit Rumah
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan
VI	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak	41,65%

No	Sasaran Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	94,92%
L	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara*	*120 PSU*
		Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Terbangun dan Terpelihara	*53 PSU*
30	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen
31	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	53 Lokasi
32	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan
33	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	20 Lokasi
34	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100 Lokasi

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 (Setelah Perubahan)

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
A	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota*	*Rp918.557.900,-*
1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp918.557.900,-
B	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Rp4.090.294.420,-*
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Rp653.467.320,-

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
	Domestik (SPALD)	
3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp3.349.445.000,-
4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp87.382.100,-
C	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Rp11.244.600,-*
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp2.072.600,-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp9.172.000,-
D	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Rp5.544.279.607,-*
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.506.904.907,-
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp37.374.700,-
E	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Rp93.898.900,-*
9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp5.194.900,-
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp88.704.000,-
F	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Rp2.310.400,-*
11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp2.310.400,-
G	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Rp175.531.600,-*
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp6.930.100,-
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp73.010.500,-
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp5.940.600,-
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp2.407.200,-
16	Penyediaan Bahan/Material	Rp3.659.000,-
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp9.017.800,-
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp74.566.400,-
H	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Rp522.855.000,-*
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.000.000,-
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Rp82.813.600,-

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
	Listrik	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp435.041.400,-
I	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Rp414.888.000,-*
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp32.288.000,-
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp205.220.000,-
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp27.170.000,-
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp150.210.000,-
J	*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	*Rp1.358.162.372,-*
26	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Rp18.260.000,-
27	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp1.339.902.372,-
K	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Rp5.634.499.700,-*
28	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp5.545.956.100,-
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp88.543.600,-
L	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*Rp18.416.070.073,-*
30	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp175.381.500,-
31	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp3.054.133.320,-
32	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp103.837.900,-
33	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp12.206.355.100,-
34	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Rp2.876.362.253,-
	TOTAL	Rp37.182.592.572,-

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung capaian kinerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah Program Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang mana program ini mendukung indikator sasaran Persentase Bebas Kumuh. Dengan adanya perbaikan rumah tidak layak huni, diharapkan dapat mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kota Pasuruan secara signifikan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Dalam pencapaian Tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan melakukan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 menunjukkan tentang capaian kinerja organisasi yang telah diperoleh selama 1 (satu) Tahun. Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	88,50	89,02	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	76,28%	82,85%	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan
		Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	90,08%	93,40%	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Sumber: Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (RPJMD Tahun 2021-2026), terdapat sasaran strategis yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman yang memiliki indikator kinerja Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh. Adapun perhitungannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator tujuan Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menghasilkan *outcome* sebesar 89,02% dari target 88,50%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh terupdate-nya data PSU perumahan dan penyerahan PSU perumahan di TA 2025. Selain itu, adanya updating data aplikasi SPASI (Sistem Pemetaan Aset, Sarana dan Infrastruktur) secara berkala, sehingga PSU Kawasan Permukiman yang layak meningkat. Adapun perhitungan realisasi indikator tujuan Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

$$(10\% \times Realisasi\ Program\ PSU\ Perumahan + 30\% \times Realisasi\ Program\ PSU\ Kawasan\ Permukiman + 30\% \times Realisasi\ Program\ Pengelolaan\ dan\ Pengembangan\ Sistem\ Penyediaan\ Air\ Minum + 30\% \times Realisasi\ Program\ Pengelolaan\ dan\ Pengembangan\ Sistem\ Air\ Limbah)$$

$$= (10\% \times 55{,}70) + (30\% \times 97{,}47) + (30\% \times 89{,}02) + (30\% \times 91{,}68)$$
$$= 5{,}57 + 29{,}24 + 26{,}70 + 27{,}50$$
$$= 89{,}02$$

2. Indikator sasaran Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak menghasilkan *outcome* sebesar 82,85% dari target 76,28%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Adapun perhitungan realisasi indikator sasaran Persentase Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak adalah sebagai berikut:

$$(35\% \times Program\ PSU\ Perumahan) + (65\% \times Program\ PSU\ Kawasan\ Permukiman)$$

Dalam hal ini, dikarenakan luas permukiman lebih besar dibandingkan luas perumahan, maka diambil proporsi perbandingan 65% untuk Program PSU Kawasan Permukiman dan 35% untuk Program PSU Perumahan.

Pada Tahun 2025, *outcome* dari Program PSU Perumahan adalah sebesar 55,70% dari target 41,65%, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Angka tersebut didapatkan dari Luas PSU perumahan yang layak (m^2) dibandingkan Total Luas PSU

perumahan (m^2). Sedangkan *outcome* dari Program PSU Kawasan Permukiman adalah sebesar 97,47% dari target 94,92%, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Angka tersebut didapatkan dari Luas PSU Kawasan Permukiman yang layak (m^2) dibandingkan Total Luas PSU Kawasan Permukiman (m^2).

Sehingga dalam perhitungan indikator sasaran Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak diperoleh hasil sebagai berikut:

$$(35\% \times Program\ PSU\ Perumahan) + (65\% \times Program\ PSU\ Kawasan\ Permukiman)$$

$= (35\% \times 55{,}70) + (65\% \times 97{,}47)$

$= 19{,}50 + 63{,}35$

$= 82{,}85$

3. Indikator sasaran Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh dari target 90,08% terealisasi 93,40%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Tabel 3.3 berikut merupakan pengurangan luasan kumuh pada Tahun 2025.

Tabel 3.3

Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2025

No	Nama Lokasi	Luasan Kumuh Awal (Ha)	Penanganan Kumuh 2024	Penanganan Kumuh 2025	Sisa Luasan Kumuh s/d 2024
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) - (d) – (e)
1	Kawasan Pesisir	30,01	0	0	30,01
2	Kawasan Sempadan Sungai	6,17	0	0	6,17
3	Kawasan Pendukung Mebel	6,82	0	0	6,82
4	Kawasan Pusat Kota 1	11,75	0	2,78	11,75
5	Kawasan Pusat Kota 2	9,28	0,52	0	8,75
6	Kawasan Industri Mebel	16,34	0	0	16,34
7	Kawasan Pertanian	9,04	0	0	9,04

No	Nama Lokasi	Luasan Kumuh Awal (Ha)	Penanganan Kumuh 2024	Penanganan Kumuh 2025	Sisa Luasan Kumuh s/d 2024
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) - (d) – (e)
8	Kawasan Batas Kota	28,10	1,89	0	26,21
	JUMLAH	117,51	2,41	2,78	112,31

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

Perhitungan realisasi Persentase Bebas Kumuh didapatkan dari:

$$\frac{(\text{Luas Kawasan Permukiman} - \text{Luas Kawasan Kumuh})}{\text{Luas Kawasan Permukiman}} x\ 100\%$$

Jumlah Luas Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebesar 1.588,15 ha, dengan luas kawasan kumuh awal sesuai SK tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pasuruan yang sebesar 117,51 ha. Pengurangan kawasan kumuh yang sudah ditangani pada Tahun 2024 sebesar 2,41 ha dan pada Tahun 2025 sebesar 2,78 ha, sehingga kawasan kumuh pada akhir Tahun 2025 sebesar 112,31 ha.

Sedangkan hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sasaran: Meningkatnya Perumahan dan Kawasan	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan	75,70%	82,85%	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Permukiman yang Layak	Permukiman yang Layak					Kota Pasuruan
2	Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh	Persentase Bebas Kumuh	94,36%	97,12%	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Sumber: Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdapat sasaran strategis yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak yang memiliki indikator kinerja Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh dengan indikator kinerja Persentase Bebas Kumuh. Adapun perhitungannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator sasaran Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak menghasilkan *outcome* sebesar 82,85% dari target 75,70%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Adapun perhitungan realisasi indikator sasaran Persentase Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak adalah sebagai berikut:

$$\left(35\% \times \begin{matrix} Persentase\ Prasarana, Sarana\ dan\ Utilitas\ Umum\ (PSU) \\ Perumahan\ yang\ Layak \end{matrix}\right) + \left(65\% \times \begin{matrix} Persentase\ Prasarana, Sarana\ dan\ Utilitas\ Umum\ (PSU) \\ Kawasan\ Permukiman\ yang\ Layak \end{matrix}\right)$$

Dalam hal ini, dikarenakan luas permukiman lebih besar dibandingkan luas perumahan, maka diambil proporsi perbandingan 65% untuk Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang Layak dan 35% untuk

Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak.

Pada Tahun 2025, *outcome* dari Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Layak adalah sebesar 55,70% dari target 41,65%, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Angka tersebut didapatkan dari Luas PSU perumahan yang layak (m^2) dibandingkan Total Luas PSU perumahan (m^2). Sedangkan *outcome* dari Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang Layak adalah sebesar 97,47% dari target 94,92%, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Angka tersebut didapatkan dari Luas PSU Kawasan Permukiman yang layak (m^2) dibandingkan Total Luas PSU Kawasan Permukiman (m^2).

Sehingga dalam perhitungan indikator sasaran Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\left(\begin{matrix}35\% \times Persentase\ Prasarana, Sarana\ dan\ Utilitas\ Umum\ (PSU) \\ Perumahan\ yang\ Layak\end{matrix}\right) + \left(\begin{matrix}65\% \times Persentase\ Prasarana, Sarana\ dan\ Utilitas\ Umum\ (PSU) \\ Kawasan\ Permukiman\ yang\ Layak\end{matrix}\right)$$

$$= (35\% \times 55{,}70) + (65\% \times 97{,}47)$$

$$= 19{,}50 + 63{,}35$$

$$= 82{,}85$$

2. Indikator sasaran Persentase Bebas Kumuh dari target 94,36% persen terealisasi 97,12%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Tabel 3.3 berikut merupakan pengurangan luasan kumuh pada Tahun 2025.

Tabel 3.5
Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2025

No	Nama Lokasi	Luasan Kumuh Awal (Ha)	Penanganan Kumuh 2024	Penanganan Kumuh 2025	Sisa Luasan Kumuh s/d 2024
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) - (d) – (e)
1	Kawasan Pesisir	30,01	0	0	30,01

No	Nama Lokasi	Luasan Kumuh Awal (Ha)	Penanganan Kumuh 2024	Penanganan Kumuh 2025	Sisa Luasan Kumuh s/d 2024
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) - (d) – (e)
2	Kawasan Sempadan Sungai	6,17	0	0	6,17
3	Kawasan Pendukung Mebel	6,82	0	0	6,82
4	Kawasan Pusat Kota 1	11,75	0	2,78	11,75
5	Kawasan Pusat Kota 2	9,28	0,52	0	8,75
6	Kawasan Industri Mebel	16,34	0	0	16,34
7	Kawasan Pertanian	9,04	0	0	9,04
8	Kawasan Batas Kota	28,10	1,89	0	26,21
	JUMLAH	117,51	2,41	2,78	112,31

Perhitungan realisasi Persentase Bebas Kumuh didapatkan dari:

$$\frac{(\text{Luas Kota} - \text{Luas Kawasan Kumuh})}{\text{Luas Kota}} x\ 100\%$$

Jumlah Luas Kota Pasuruan adalah sebesar 3.900 ha, dengan luas kawasan kumuh awal sesuai SK tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pasuruan yang sebesar 117,51 ha. Pengurangan kawasan kumuh yang sudah ditangani pada Tahun 2024 sebesar 2,41 ha dan Tahun 2025 sebesar 2,78 ha, sehingga kawasan kumuh pada akhir Tahun 2025 sebesar 112,31 ha.

a. Ketercapaian Indikator Sasaran Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak (PK sebelum perubahan) dan Indikator Sasaran Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak (PK setelah perubahan) didukung beberapa faktor. Terkait kegiatan pembangunan/peningkatan PSU perumahan faktor yang mendukung tercapainya indikator tersebut antara lain: penyedia yang tepat, koordinasi yang baik antara pemberi kerja,

perencana, pengawas dan penyedia. Terkait kegiatan pemeliharaan PSU perumahan, faktor yang mendukung tercapainya indikator tersebut yaitu bahan atau material yang tersedia, tenaga lapangan yang bekerja dengan baik sesuai tupoksi. Terkait kegiatan penyerahan PSU perumahan, faktor yang mendukung tercapainya indikator tersebut antara lain: koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Penyerahan, Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan, selain itu ketercapaian program PSU didukung oleh pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU. Dan yang terakhir adalah karena terupdate-nya data PSU perumahan dan updating data aplikasi SPASI (Sistem Pemetaan Aset, Sarana dan Infrastruktur) secara berkala, sehingga PSU Kawasan Permukiman yang layak meningkat.

Tingkat keberhasilan yang telah dicapai indikator kinerja sasaran tersebut antara lain melaksanakan pembangunan/ peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur baik di perumahan yang layak maupun di permukiman yang layak, serta melaksanakan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.

Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah keterbatasan jumlah SDM yang tersedia, sehingga penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) belum maksimal. Selain adanya hambatan terkait selisih luasan PSU perumahan sehingga mendorong adanya mekanisme baru dalam penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.

b. Ketercapaian Indikator Sasaran Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh (PK sebelum perubahan) dan Indikator Sasaran Persentase Bebas Kumuh (PK setelah perubahan) terbilang sangat tinggi dikarenakan adanya penanganan di kawasan kumuh terkait pembangunan jalan paving dan drainase, rehabilitasi rumah tidak

layak huni, penyediaan akses air minum yang layak, serta pengelolaan air limbah.

Untuk mendukung keberhasilan indikator sasaran tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan melaksanakan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang terdiri dari kegiatan pengembangan sarana prasarana kawasan permukiman tematik, kegiatan perencanaan, monev dan pengendalian kawasan permukiman, kegiatan pembangunan sarana prasarana permukiman; kegiatan peningkatan sarana prasarana permukiman; kegiatan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman dan kegiatan pemeliharaan dan operasional rutin Tempat Pemakaman Umum.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Keberhasilan kinerja Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak, menghasilkan outcome sebesar 97,47% dari target 94,92% atau capaian indikator 100%. Angka tersebut didukung oleh kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan 2 sub kegiatan yakni Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dan Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan.

Terkait pembangunan sarana prasarana permukiman menghasilkan output jumlah lokasi PSU yang dilaksanakan perbaikan sebanyak 20 lokasi dari target 20 lokasi atau capaian indikator 100 persen. Ketercapaian tersebut didukung dengan optimalisasi ketersediaan anggaran, adanya peningkatan PSU yang cukup memadai, dan peningkatan peran masyarakat dalam mengajukan usulan pembangunan yang dibutuhkan melalui musrenbang kelurahan. Hasil usulan tersebut ditindaklanjuti ke

musrenbang kecamatan, forum pemangku kepentingan PD hingga musrenbang tingkat kota yang menghasilkan keputusan prioritas kegiatan serta peran konsultan perencana, kontraktor dan konsultan pengawas dalam melaksanakan paket pekerjaan sesuai proses pengadaan.

Selain itu, terdapat program lain yang menunjang indikator sasaran tersebut, yakni Program Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani, dimana jumlah rumah yang diperbaiki pada Tahun 2025 adalah sebesar 300 unit rumah dari target 300 unit rumah. Ketercapaian perbaikan rumah tersebut dikarenakan adanya penerima bantuan yang tertib administrasi dan kerjasama yang baik antara penerima bantuan, penyedia, dan pihak terkait lainnya.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum juga menjadi salah satu program yang menunjang indikator sasaran tersebut, yang menghasilkan outcome sebesar 89,02% dari target 97,90% atau capaian indikator 90,93%. Ketidaktercapaian program ini dikarenakan realisasi rumah tangga yang terlayani akses air minum yang aman lebih kecil dari target yang telah direncanakan dan beberapa SR tidak memungkinkan dibangun karena tidak ada jaringan distribusi, sehingga tidak memenuhi target awal pembangunan.

Terakhir, terdapat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang menghasilkan outcome sebesar 91,68% dari target 93,27% atau capaian indikator sebesar 98,30%. Ketidaktercapaian program ini disebabkan adanya efisiensi paket septik individu DAU pada tahun 2024, dari 6 paket menjadi 1 paket septik individu purworejo sehingga hanya 190 SR dari target awal 547 SR.

Tingkat keberhasilan yang telah dicapai indikator kinerja sasaran Persentase Bebas Kumuh antara lain melaksanakan pembangunan infrastruktur PSU di lokasi kawasan kumuh, agar

lokasi kawasan kumuh menjadi layak untuk kawasan permukiman.

Hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran ini adalah keterbatasan jumlah SDM yang tersedia serta kondisi setiap lokasi yang memiliki karakteristik tidak sama sehingga penanganan PSU belum maksimal.

3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Hasil Pengukuran Kinerja disajikan dalam Tabel Pencapaian Kinerja yang menunjukkan target dan realisasi *outcome* dari setiap program pada Tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan sehingga persentase capaian tingkat keberhasilan atau kegagalan dari *outcome* program tersebut dapat dibandingkan dengan hasil pengukuran kinerja Tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja Tahun sebelumnya atau Tahun 2024 diuraikan pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman (PK Sebelum Perubahan-Renstra 2021-2026)	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	87,52	88,50	89,02	100,00%
		Persentase PSU	-	80,25%	76,28%	82,85%	100,00%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perumahan dan Permukiman yang Layak					
		Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	-	93,23%	90,08%	93,40%	100,00%
2	Sasaran 1: Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak (PK Setelah Perubahan-Renstra 2025-2029)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	-	80,25%	75,70%	82,85%	100,00%
3	Sasaran 2: Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh (PK Setelah Perubahan-Renstra 2025-2029)	Persentase Bebas Kumuh	95,97%	97,05%	94,36%	97,12%	100,00%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

Dapat dijelaskan bahwa tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan mengalami perubahan dalam beberapa Tahun terakhir. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian yang lebih terarah dan menyeluruh secara makro sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diampu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adanya perubahan tujuan dinas tersebut juga berimplikasi terhadap perubahan indikator tujuan dan sasaran, sehingga menimbulkan perbedaan dengan Tahun-Tahun sebelumnya. Selain itu, dikarenakan Tahun 2025 merupakan masa transisi kepemimpinan kepala daerah periode 2025-2029, maka disusunlah dokumen perencanaan yang baru sesuai dengan visi misi kepala daerah, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan juga mengalami perubahan menyesuaikan visi misi kepala daerah.

Pada Tahun 2023 terdapat dua sasaran, sasaran yang pertama adalah Meningkatnya Sistem Tata Kelola yang baik dalam Menjamin Pelayanan Prima yang memiliki tiga indikator, yang meliputi Nilai SAKIP SKPD, yang mana pada Tahun 2023 mengalami penurunan berdasarkan penilaian Tahun 2022, dari 67,41% menjadi 61,91%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa sebab yang salah satunya adalah karena implementasi SAKIP tersebut tidak begitu berdampak dalam efektivitas dan efisiensi kerja. Selanjutnya adalah Persentase Temuan Anggaran yang Ditindaklanjuti setiap Tahunnya memiliki capaian 100%. Dan indikator yang terakhir adalah Persentase Rata-Rata Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD yang setiap Tahunnya juga mengalami perubahan yakni pada Tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 95,89% dan pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 138,79%, sehingga mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa program yang capaiannya di atas 100 persen, beberapa dikarenakan adanya kesalahan dalam pemasangan target awal. Namun pada Tahun 2024, ketiga indikator dari sasaran pertama tersebut tidak lagi digunakan.

Sasaran kedua adalah Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki indikator Persentase Rumah Layak Huni yang setiap Tahunnya mengalami peningkatan, yang mana dari Tahun 2022 sebesar 97,56% dan sebesar 98,10% pada Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya sumber dana lain dari APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selanjutnya terdapat indikator Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh pada Tahun 2022, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan pada Tahun 2023. Perubahan tersebut hanya berupa perubahan diksi saja, sehingga untuk target per Tahunnya bernilai sama. Persentase Penurunan Luas Kawasan Permukiman Kumuh pada Tahun 2022 memiliki realisasi kinerja sebesar 62,33%. Sedangkan

realisasi kinerja Persentase Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan pada Tahun 2023 adalah sebesar 4,03%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya update SK tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pasuruan Nomor: 188/333/423.011/2022 tanggal 30 Desember 2022. Selain itu, adanya perubahan rumus perhitungan persentase permukiman kumuh kawasan perkotaan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86.

Sedangkan pada Tahun 2024 memiliki tujuan Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan dengan indikator Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki realisasi kinerja sebesar 87,52%. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2024, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berupa peningkatan Paket Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi Perpipaan Air Minum eksisting tanpa penambahan Sambungan Rumah (SR) baru, sehingga capaian program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum tidak ada kenaikan presentase atau dengan kata lain capaian sama dengan Tahun sebelumnya. Selain itu, juga disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap PSU yang layak akibat meningkatnya kuantitas kawasan permukiman, yang belum mampu diimbangi dengan kemampuan penanganan PSU kawasan permukiman.

Sedangkan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan yakni Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman memiliki dua indikator, yakni Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh yang realisasi kinerjanya sebesar 93,23% yang didukung oleh adanya penanganan permukiman kumuh melalui penganggaran kegiatan secara lintas sektoral (berbagai PD). Indikator kedua yakni Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak, dimana memiliki realisasi kinerja sebesar 80,25%. Hal tersebut didukung oleh adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU, sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan, selain itu ketercapaian program PSU didukung oleh

pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU.

Pada Tahun 2025, berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Periode Tahun 2021-2026 memiliki tujuan Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan dengan indikator tujuan Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Serta memiliki 1 sasaran yakni Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman dengan indikator sasaran Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh dan Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak.

Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki realisasi kinerja sebesar 89,02% dikarenakan koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan. Selain itu ketercapaian program PSU didukung oleh pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU. Dan yang terakhir adalah karena terupdate-nya data PSU perumahan dan updating data aplikasi SPASI (Sistem Pemetaan Aset, Sarana dan Infrastruktur) secara berkala, sehingga PSU Kawasan Permukiman yang layak meningkat. Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh memiliki realisasi kinerja sebesar 93,40% dikarenakan adanya penanganan permukiman kumuh melalui penganggaran kegiatan secara lintas sektoral (berbagai PD). Dan yang terakhir adalah Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak memiliki realisasi kinerja sebesar 82,85% yang dikarenakan koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan. Selain itu ketercapaian program PSU didukung oleh pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU. Dan yang terakhir adalah karena terupdate-nya data PSU perumahan dan updating data aplikasi SPASI (Sistem Pemetaan Aset, Sarana dan Infrastruktur) secara berkala, sehingga PSU Kawasan Permukiman yang layak meningkat.

Sedangkan berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Periode Tahun 2025-2029 memiliki tujuan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator tujuan Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Serta memiliki 2 sasaran yakni Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh dengan indikator sasaran Persentase Bebas Kumuh dan Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dengan indikator sasaran Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak. Persentase Bebas Kumuh memiliki realisasi kinerja sebesar 97,12%. Sedangkan Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak memiliki realisasi kinerja sebesar 82,85%, adapun ketercapaian dari indikator tersebut dikarenakan hal yang sama dengan indikator sasaran Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh dan Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak pada Renstra Periode 2021-2026.

Jika pada Tahun 2023 dan 2024 dikonversi menyesuaikan indikator yang baru berdasarkan Renstra Periode 2025-2029, maka pada Tahun 2023 indikator sasaran Persentase Bebas Kumuh memiliki realisasi sebesar 95,97%. Sedangkan pada Tahun 2024 memiliki realisasi sebesar 97,05%. Kemudian untuk indikator sasaran Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak pada Tahun 2024, memiliki realisasi kinerja sebesar 80,25%.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan yang disebabkan karena adanya penanganan kumuh yang semakin bertambah tiap tahunnya dan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Periode Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat pada Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Periode Tahun 2021-2026 dan Periode Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = ⅘*100
1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman (PK Sebelum Perubahan-Renstra 2021-2026)	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	89,02	88,65	100,00%
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	82,85%	76,28%	100,00%
		Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	93,40%	91,46%	100,00%
2	Sasaran 1: Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak (PK Setelah Perubahan-Renstra 2025-2029)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	82,85%	83,44%	99,29%
3	Sasaran 2: Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh (PK Setelah Perubahan-Renstra 2025-2029)	Persentase Bebas Kumuh	97,12%	100%	97,12%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Renstra Periode 2021-2026, kemajuan indikator sasaran terkait Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak, dan Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh masing-masing adalah 100%. Yang dalam hal ini, berarti sudah mencapai target akhir Renstra pada Tahun 2026.

Namun, berdasarkan Renstra Periode 2025-2029, kemajuan indikator sasaran terkait Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak adalah sebesar 99,29%. Kemajuan tersebut cukup besar dikarenakan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU. Sedangkan, kemajuan indikator sasaran Persentase Bebas Kumuh adalah sebesar 97,12%. Hal itu disebabkan oleh adanya penanganan permukiman kumuh melalui penganggaran kegiatan secara lintas sektoral (berbagai PD).

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lain tampak sebagaimana pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Pengurangan Kumuh Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh Awal (Ha)	Capaian Absolut 2025 (Ha)	Capaian Kumulatif s/d 2025 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Pacitan	16,48	16,48	16,48	0,00
2	Kab. Ponorogo	192,03	12,25	12,25	179,78
3	Kab. Trenggalek	174,17	8,49	8,49	165,68

No	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh Awal (Ha)	Capaian Absolut 2025 (Ha)	Capaian Kumulatif s/d 2025 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Kab. Tulungagung	194,51	24,18	24,18	170,33
5	Kab. Blitar	437,6	104,53	104,53	333,07
6	Kab. Kediri	480,25	215,23	215,23	265,02
7	Kab. Malang	142,87	42,54	42,54	100,33
8	Kab. Lumajang	763,97	34,07	34,07	729,90
9	Kab. Jember	574,05	222,66	222,66	351,39
10	Kab. Banyuwangi	95,08	8,82	8,82	86,26
11	Kab. Bondowoso	433,92	9,75	9,75	424,17
12	Kab. Situbondo	102,84	31,22	31,22	71,62
13	Kab. Probolinggo	201,77	7,98	7,98	193,79
14	Kab. Pasuruan	440,44	63,12	63,12	377,32
15	Kab. Sidoarjo	140,43	132,01	132,01	8,42
16	Kab. Mojokerto	246,51	50,75	50,75	195,77
17	Kab. Jombang	618,16	18,40	18,40	599,76
18	Kab. Nganjuk	83,33	63,48	63,48	19,85
19	Kab. Madiun	161,41	70,28	70,28	91,13
20	Kab. Magetan	292,03	18,74	18,74	273,29
21	Kab. Ngawi	48,13	0,00	0,00	48,13
22	Kab. Bojonegoro	141,36	36,38	36,38	104,98
23	Kab. Tuban	211,37	171,75	171,75	39,62
24	Kab. Lamongan	360,98	5,18	5,18	355,81
25	Kab. Gresik	255,03	25,82	25,82	229,21
26	Kab. Bangkalan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kab. Sampang	342,48	0,00	0,00	342,48
28	Kab. Pamekasan	173,13	51,71	51,71	121,42
29	Kab. Sumenep	137,38	27,28	27,28	110,10
30	Kota Kediri	135,78	18,96	18,96	116,82
31	Kota Blitar	140,57	63,16	63,16	77,41
32	Kota Malang	27,21	0,00	0,00	27,21

No	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh Awal (Ha)	Capaian Absolut 2025 (Ha)	Capaian Kumulatif s/d 2025 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	Kota Probolinggo	23,24	1,49	1,49	21,85
34	Kota Pasuruan	117,51	5,19	5,19	112,31
35	Kota Mojokerto	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kota Madiun	211,11	57,58	57,58	153,53
37	Kota Surabaya	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kota Batu	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		8.117,23	1.619,47	1.619,47	6.497,76

Sumber: Berita Acara Capaian Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur

Jumlah luas kawasan kumuh awal sesuai SK tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pasuruan adalah sebesar 117,51 ha, dan pengurangan kawasan kumuh yang sudah ditangani sampai Tahun 2025 adalah sebesar 5,19 ha, sehingga sisa luas kawasan kumuh pada akhir Tahun 2025 sebesar 112,31 ha. Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain seperti Kab. Lamongan yang memiliki luas kawasan kumuh sebesar 360,98 ha, dengan penanganan kumuhnya yang sebesar 5,18 ha, maka dapat dikatakan bahwa penanganan kumuh di Kota Pasuruan masih terbilang cukup baik.

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas, dapat dilihat bahwa Kota Pasuruan memiliki kontribusi yang cukup baik dalam penanganan kawasan kumuh di Jawa Timur dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, dikarenakan masih ada beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur yang memiliki capaian penanganan kumuh di bawah capaian Kota Pasuruan.

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman (PK Sebelum Perubahan-Renstra 2021-2026)	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	88,50	89,02	100,00 %	terupdate-nya data PSU perumahan dan penyerahan PSU perumahan di TA 2025. Selain itu, adanya updating data aplikasi SPASI (Sistem Pemetaan Aset, Sarana dan Infrastruktur) secara berkala, sehingga PSU Kawasan Permukiman yang layak meningkat	
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	76,28%	82,85%	100,00 %	didukung oleh adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan selain itu ketercapaian program PSU	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						didukung oleh pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU	
		Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	90,08%	93,40%	100,00 %	adanya penanganan permukiman kumuh melalui penganggaran kegiatan secara lintas sectoral (berbagai PD)	
2	Sasaran 1: Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak (PK Setelah Perubahan-Renstra 2025-2029)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	75,70%	82,85%	100,00 %	didukung oleh adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan selain itu ketercapaian program PSU didukung oleh pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Sasaran 2: Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh (PK Setelah Perubahan-Renstra 2025-2029)	Persentase Bebas Kumuh	94,36%	97,12%	100,00%	adanya penanganan permukiman kumuh melalui penganggaran kegiatan secara lintas sectoral (berbagai PD)	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Renstra Periode 2021-2026, Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki capaian sebesar 100 persen dikarenakan terupdate-nya data PSU perumahan dan penyerahan PSU perumahan di TA 2025. Selain itu, adanya updating data aplikasi SPASI (Sistem Pemetaan Aset, Sarana dan Infrastruktur) secara berkala, sehingga PSU Kawasan Permukiman yang layak meningkat. Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak memiliki capaian sebesar 100 persen dikarenakan adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan selain itu ketercapaian program PSU didukung oleh pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU. Dan Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh memiliki capaian sebesar 100 persen dikarenakan adanya penanganan permukiman kumuh melalui penganggaran kegiatan secara lintas sektoral (berbagai PD).

Sedangkan berdasarkan Renstra Periode 2025-2029, Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Persentase Bebas Kumuh memiliki capaian sebesar 100% dikarenakan hal yang sama dengan indikator Persentase PSU Perumahan dan

Permukiman yang Layak dan indikator Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh berdasarkan Renstra Periode 2021-2026.

3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman (PK Sebelum Perubahan-Renstra 2021-2026)	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	88,50	89,02	100,00%	37.182.592.572	32.381.447.368	87,09%	15,50%
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	76,28 %	82,85%	100,00%	18.416.070.073	14.969.714.272	81,29%	33,62%
		Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	90,08 %	93,40%	100,00%	18.766.522.499	17.411.733.096	92,78%	11,75%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Sasaran 1: Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak (PK Setelah Perubahan-Renstra 2025-2029)	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	75,70 %	82,85%	100,00%	18.416.070.073	14.969.714.272	81,29%	34,64%
3	Sasaran 2: Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh (PK Setelah Perubahan-Renstra 2025-2029)	Persentase Bebas Kumuh	94,36 %	97,12%	100,00 %	18.766.522.499	17.411.733.096	92,78%	10,93%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Dari indikator sasaran di atas, keduanya memiliki efisiensi yang cukup besar dikarenakan adanya capaian kinerja yang melampaui target yang ditentukan. Adapun upaya efisiensi yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan melalui Tim Anggaran dengan melakukan rasionalisasi anggaran (pergeseran dan PAK) untuk menentukan program dan kegiatan prioritas

sebagaimana hasil evaluasi dan monitoring Tim Anggaran dalam rangka menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat;

2. Memaksimalkan kinerja dengan sumber daya dan sarana prasarana yang tersedia, meskipun dengan anggaran yang terbatas; dan
3. Dengan mengoptimalkan sumber dana lain selain APBD untuk meningkatkan efisiensi capaian kinerja indikator sasaran.

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan Tabel 3.11 dan Tabel 3.12 di bawah ini:

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
(PK Sebelum Perubahan-Renstra Periode 2021-2026)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	90,93%	Menunjang	Adanya pelaksanaan pembangunan panjang jaringan perpipaan sehingga menunjang capaian kinerja Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengelolaan dan Pengemban	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani	98,30%	Menunjang	Adanya pelaksanaan pembangunan septictank individu dan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				gan Sistem Air Limbah	Sistem Air Limbah yang Memadai			komunal sehingga menunjang capaian kinerja Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang Layak	100%	Menunjang	Adanya pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas dan penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang sehingga menunjang capaian kinerja Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	100%	Menunjang	Adanya pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas, sehingga menunjang capaian kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	100%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang Layak	100%	Menunjang	Adanya pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas dan penyerahan PSU Perumahan oleh Pengembang sehingga menunjang capaian kinerja Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak
					Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	100%	Menunjang	Adanya pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas, sehingga menunjang capaian kinerja Persentase PSU Perumahan dan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Permukiman yang Layak
		Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	90,93%	Menunjang	Adanya pelaksanaan pembangunan panjang jaringan perpipaan sehingga menunjang capaian kinerja Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai	98,30%	Menunjang	Adanya pelaksanaan pembangunan septictank individu dan komunal sehingga menunjang capaian kinerja Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase Backlog Rumah	100%	Menunjang	Adanya pengelolaan rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga menunjang capaian kinerja Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	100%	Menunjang	Adanya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga menunjang capaian kinerja Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Berdasarkan Tabel 3.11 di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung oleh 3 program yakni Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Adapun hal yang mendukung indikator sasaran tersebut adalah terupdate-nya data PSU perumahan dan penyerahan PSU perumahan di TA 2025. Selain itu, adanya updating data aplikasi SPASI (Sistem Pemetaan Aset, Sarana dan Infrastruktur) secara berkala, sehingga PSU Kawasan Permukiman yang layak meningkat.

Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak yang didukung oleh satu program, yakni Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Adapun hal yang mendukung indikator sasaran tersebut adalah adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan. Selain itu ketercapaian program PSU didukung oleh pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU

yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU. Dan yang terakhir adalah karena terupdate-nya data PSU perumahan dan updating data aplikasi SPASI (Sistem Pemetaan Aset, Sarana dan Infrastruktur) secara berkala, sehingga PSU Kawasan Permukiman yang layak meningkat.

Yang kedua indikator Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh didukung oleh empat program yakni Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Kawasan Permukiman, dan Program Pengembangan Perumahan. Hal yang mendukung indikator tersebut antara lain adanya penanganan permukiman kumuh melalui penganggaran kegiatan secara lintas sektoral (berbagai PD), rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta adanya pengelolaan rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga menunjang capaian kinerja Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh.

Tabel 3.12
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
(PK Setelah Perubahan-Renstra Periode 2025-2029)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran 1: Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	100%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan yang Layak	100%	Menunjang	Adanya pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas dan penyerahan PSU Perumahan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								oleh Pengembang sehingga menunjang capaian kinerja Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak
					Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman yang Layak	100%	Menunjang	Adanya pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas, sehingga menunjang capaian kinerja Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak
2	Sasaran 2: Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh	Persentase Bebas Kumuh	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	90,93%	Menunjang	Adanya pelaksanaan pembangunan panjang jaringan perpipaan sehingga menunjang capaian kinerja Persentase Bebas Kumuh
				Program Pengelolaan	Persentase Rumah	98,30%	Menunjang	Adanya pelaksanaan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Tangga yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai			pembangunan septictank individu dan komunal sehingga menunjang capaian kinerja Persentase Bebas Kumuh
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase Backlog Rumah	100%	Menunjang	Adanya pengelolaan rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga menunjang capaian kinerja Persentase Bebas Kumuh
				Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	100%	Menunjang	Adanya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga menunjang capaian kinerja Persentase Bebas Kumuh

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Berdasarkan Tabel 3.12 di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak yang didukung oleh satu program, yakni Program Peningkatan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Sama halnya dengan indikator sasaran Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak (Renstra Periode 2021-2026), hal yang mendukung indikator sasaran tersebut adalah adanya adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antara Tim Verifikasi, pengembang dan TFL PSU sehingga penyerahan PSU dapat dilaksanakan. Selain itu ketercapaian program PSU didukung oleh pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan PSU yang berdasarkan skala prioritas hasil penilaian tingkat kerusakan PSU. Dan yang terakhir adalah karena terupdate-nya data PSU perumahan dan updating data aplikasi SPASI (Sistem Pemetaan Aset, Sarana dan Infrastruktur) secara berkala, sehingga PSU Kawasan Permukiman yang layak meningkat.

Yang kedua indikator Persentase Bebas Kumuh didukung oleh empat program yakni Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Kawasan Permukiman, dan Program Pengembangan Perumahan. Sama halnya dengan indikator sasaran Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh (Renstra Periode 2021-2026), hal yang mendukung indikator tersebut antara lain adanya penanganan permukiman kumuh melalui penganggaran kegiatan secara lintas sektoral (berbagai PD), rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta adanya pengelolaan rusunawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga menunjang capaian kinerja Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh.

3.2 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil

dari program kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	918.557.900	739.441.566	80,50%
1	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*	*918.557.900*	*739.441.566*	*80,50%*
B	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.090.294.420	3.587.127.411	87,69%
2	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*4.090.294.420*	*3.587.127.411*	*87,69%*
C	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.765.008.107	6.176.315.509	91,29%
3	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*11.244.600*	*10.083.570*	*89,67%*
4	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*5.544.279.607*	*5.112.497.430*	*92,21%*
5	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*93.898.900*	*79.002.740*	*84,13%*
6	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*2.310.400*	*2.173.575*	*94,07%*

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*175.531.600*	*140.260.367*	*79,90%*
8	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*522.855.000*	*458.837.829*	*87,75%*
9	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*414.888.000*	*373.459.998*	*90,01%*
D	Program Pengembangan Perumahan	1.358.162.372	1.279.154.616	94,18%
10	*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	*1.358.162.372*	*1.279.154.616*	*94,18%*
E	Program Kawasan Permukiman	5.634.499.700	5.629.693.994	99,91%
11	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*	*5.634.499.700*	*5.629.693.994*	*99,91%*
F	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	18.416.070.073	14.969.714.272	81,28%
12	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*18.416.070.073*	*14.969.714.272*	*81,28%*
JUMLAH		37.182.592.572	32.381.447.368	87,08%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

Realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp32.381.447.368,- atau 87,08% dari pagu anggaran Rp37.182.592.572,- sehingga terdapat SILPA sebesar Rp4.801.145.204,-. Hambatan dalam penyerapan pagu anggaran Tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya komitmen pelaksana kegiatan terhadap anggaran kas/*schedule* yang telah ditetapkan; dan
2. Jangka waktu pengadaan barang/jasa yang terpengaruh adanya efisiensi serta pembaruan tata cara pengadaan sehingga mempengaruhi ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan.

3.3 Inovasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan memiliki tiga inovasi aplikasi berbasis sistem informasi untuk mendukung tugas dan fungsi pada layanan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu sebagai berikut:

1. Aplikasi Simpan (Sistem Informasi Perumahan)

   Merupakan aplikasi yang menyediakan informasi tentang PSU di dalam perumahan dan tentang kepemilikan PSU di perumahan-perumahan Kota Pasuruan.
2. Aplikasi Spasi (Sistem Pemetaan Aset, Sarana dan Infrastruktur)

   Merupakan aplikasi yang digunakan sebagai *database* pendataan dan pemetaan aset jalan, drainase, dan penerangan jalan lingkungan pada perumahan dan kawasan permukiman.
3. Aplikasi Simpel Makam (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pemakaman)

   Merupakan aplikasi yang menyajikan data terkait informasi dan layanan pemakaman di makam warga maupun makam khusus di Kota Pasuruan. Selain itu, aplikasi tersebut juga menyajikan layanan masyarakat berupa *chat*/ *e-mail*/ *message*.

3.4 Penghargaan

Penghargaan/ capaian keberhasilan yang telah diperoleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Penghargaan/ Capaian Keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

No	Kriteria	Peringkat	Dokumentasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lomba Tertib Arsip Antar Perangkat Daerah Tahun 2022	Juara 1	
2	Lomba Tim Budaya Kerja	Terbaik 1	
3	Walidata Pendukung Terbaik Tahun 2025	Terbaik 1	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan

Pada Tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan memiliki penghargaan Walidata Pendukung Terbaik I Tahun 2025. Dengan adanya penghargaan tersebut dapat menjadikan motivasi kami untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan keberhasilan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025. Ada 2 (dua) sasaran strategis yang diwujudkan untuk pencapaian indikator sasaran strategis. Ada beberapa capaian indikator kinerja sasaran yang dinilai berhasil. Adapun keberhasilan capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2025 (Renstra Periode 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian									
				Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
MISI IV: Meningkatkan Infrastruktur Kota, Sarana dan Prasarana Dasar serta Pemanfaatan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan													
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	3	100	3	100								

Tabel 4.2
Rekapitulasi Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2025 (Renstra Periode 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian									
				Sangat Tinggi		Tinggi		Sedang		Rendah		Sangat Rendah	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
MISI IV: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berorientasi pada Peran Kepemudaan, Kebudayaan dan Harmonisasi Sosial dan MISI V: Mewujudkan Kota yang Indah dan Nyaman melalui Penguatan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkelanjutan													
1	Sasaran 1: Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	1	100	1	100								
2	Sasaran 2: Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh	1	100	1	100								

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) indikator sasaran dari 1 (satu) sasaran strategis yang termasuk pada kategori “Sangat Tinggi”, 0 (nol) indikator sasaran yang masuk kategori “Tinggi”, 0 (nol) indikator sasaran yang masuk kategori “Sedang”, 0 (nol) indikator sasaran yang masuk kategori “Rendah” dan 0 (nol) indikator sasaran yang masuk kategori “Sangat Rendah”.

Sedangkan berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran strategis yang termasuk pada kategori “Sangat Tinggi”, 0 (nol) indikator sasaran yang masuk kategori “Tinggi”, 0 (nol) indikator sasaran yang masuk kategori “Sedang”, 0 (nol) indikator sasaran yang masuk kategori “Rendah” dan 0 (nol) indikator sasaran yang masuk kategori “Sangat Rendah”.

Adapun kendala atau hambatan yang terjadi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Data BNBA PDAM tidak akurat, beberapa SR tidak memungkinkan di bangun SR PDAM karena tidak ada bangunan sehingga tidak memenuhi target awal pembangunan;
2. Pembagian tim operasional dan pemeliharaan Air Limbah belum maksimal;
3. Masih kurangnya promosi program sedot tinja;
4. Penyusunan SPJ dari KSM membutuhkan waktu;
5. Penyaluran perlu reviu inspektorat sehingga membutuhkan waktu;
6. Proses perijinan dan pemenuhan dokumen pengajuan tapak perlu beberapa waktu;
7. Adanya warga yang tidak konsisten dengan penggunaan dana upah tukang;
8. Adanya penyesuaian SK penerima bantuan RTLH;
9. Nota dan kwitansi pembelian bahan tidak tersimpan dengan baik;
10. Kurangnya pemahaman masyarakat akan tujuan rencana tapak dan penyerahan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota Pasuruan;

11. Koordinasi rumit dan kurangnya dukukan masyarakat di lokasi proyek;
12. Kurangnya koordinasi pelaksana dengan dinas/ masyarakat;
13. Kurangnya pengawasan pelaksanaan fisik;
14. Banyaknya PSU kawasan permukiman yang telah dibangun di atas tanah masyarakat;
15. Kurang maksimalnya penyampaian informasi dari ketua RT dan RW setempat kepada masyarakat terkait pentingnya legalitas status tanah di bawah jalan dan saluran, sehingga di beberapa lokasi masih dijumpai permasalahan;
16. Ketidakkonsistenan masyarakat dalam kesepakatan perencanaan pembangunan;
17. Adanya perubahan nomenklatur peraturan terkait batas nominal pengadaan langsung konstruksi;
18. Beberapa lokasi pembangunan terkendala status aset tanah di bawah jalan dan saluran yang masih menjadi hak milik masyarakat dan tidak bersedia menyerahkan kepada pemkot; dan
19. Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar mereka, sehingga tingkat ketergantungan kepada pemkot relatif tinggi.

Berdasarkan kendala atau hambatan di atas, maka solusi yang dapat dilakukan untuk perbaikan Tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

1. PDAM diharapkan dapat melakukan updating data BNBA untuk usulan perluasan SPAM tahun selanjutnya;
2. Optimalisasi jadwal dan pembagian tugas tim agar operasional dan pemeliharaan lebih efektif;
3. Promosi yang lebih massif;
4. Menghimbau langkah-langkah percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik agar bisa selesai tepat waktu;
5. Koordinasi dengan KSM serta kelurahan lebih intensif;
6. Pengawasan dalam tertib administrasi;
7. Pengajuan tapak sesuai dengan prosedur;

8. Perlunya pengawasan pemenuhan dan pengurusan perijinan sehingga prosesnya sesuai timeline;
9. Monitoring pembangunan fisik RTLH;
10. Himbauan tertib administrasi;
11. Memberikan timeline yang jelas untuk penyelesaian dokumen SPJ;
12. Memberikan sosialisasi dan konsultasi kepada pemohon rencana tapak;
13. Menghimbau pengembang yang sudah memenuhi syarat untuk segera melaksanakan penyerahan PSU perumahan;
14. Menjalin koordinasi yang baik dan pemaparan informasi yang jelas terkait pelaksanaan fisik kepada masyarakat;
15. Menampung aspirasi masyarakat dalam proses pelaksanaan fisik;
16. Pendampingan tim teknis dalam pelaksanaan pekerjaan fisik;
17. Identifikasi lanjut hasil kesepakatan status tanah di bawah jalan dan saluran;
18. Koordinasi aktif dengan BPKA dan BPN terkait prosedur penyerahan sebagian hak atas tanah masyarakat kepada Pemkot sebagai PSU kawasan permukiman;
19. Sosialisasi kepada masyarakat penerima pembangunan;
20. Koordinasi aktif dengan BPBJ terkait pelaksanaan lelang/ tender paket konstruksi; dan
21. Koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan mereka.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, dan khususnya untuk Tahun 2025 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai harapan.

4.2 Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, yakni sebagai berikut:

1. Melakukan koreksi terhadap capaian kinerja OPD dengan membandingkan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pasuruan, 23 Februari 2026

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PASURUAN

Akung Novianto Sodiq Nuch, ST, MT
NIP. 19721125 200312 1 006

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON II
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
Jabatan : PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pihak Pertama,
PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP. 197211252003121006

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA	:	AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP	:	197211252003121006
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TINGKAT I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	88.5
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	90.08
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	76.28

NO	PRORGAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	928.232.100,00	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	4.229.722.420,00	APBD
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp	7.125.514.841,00	APBD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	1.387.298.200,00	APBD
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	5.651.722.800,00	APBD
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	20.184.565.172,00	APBD
JUMLAH		**Rp**	**39.507.055.533,00**	**APBD**

Pasuruan, 02 Januari 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP. 197211252003121006

PERJANJIAN KINERJA

ESELON II

NAMA	:	AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP	:	197211252003121006
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TINGKAT I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																										%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML			
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%					88.5						88.5						88.5						88.5		88.5		
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	%					90.08						90.08						90.08						90.08		90.08		
3	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	%					76.28						76.28						76.28						76.28		76.28		
CAPAIAN OUTPUT																														
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																														

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	928.232.100,00	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	4.229.722.420,00	APBD
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp	7.125.514.841,00	APBD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	1.387.298.200,00	APBD
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	5.651.722.800,00	APBD

6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	20.184.565.172,00	
JUMLAH		**Rp**	**39.507.055.533,00**	

Pasuruan, 02 Januari 2025

Mengetahui,
Pejabat Atasan Langsung
WALI KOTA

ADI WIBOWO

PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP. 197211252003121006

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan Tahun 2025

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
Jabatan : PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : ADI WIBOWO
Jabatan : WALI KOTA
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 18 September 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pihak Pertama,
PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP. 197211252003121006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP	:	197211252003121006
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TINGKAT I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN	:	2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	-	90.08	-
2	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	76.28	75.70
3	Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh	-	Persentase Bebas Kumuh	-	94.36

NO	PROGRAM	ANGGARAN				KETERANGAN
		SEBELUM		SESUDAH		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	928.232.100,00	Rp	918.557.900,00	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	4.229.722.420,00	Rp	4.090.294.420,00	APBD
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp	7.125.514.841,00	Rp	6.765.008.107,00	APBD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	1.387.298.200,00	Rp	1.358.162.372,00	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 5.651.722.800,00	Rp 5.634.499.700,00	APBD
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 20.184.565.172,00	Rp 18.416.070.073,00	APBD
JUMLAH		**Rp 39.507.055.533,00**	**Rp 37.182.592.572,00**	**APBD**

Pasuruan, 18 September 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pihak Pertama,
PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP. 197211252003121006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

ESELON II

NAMA	:	AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP	:	197211252003121006
PANGKAT / GOL.	:	PEMBINA TINGKAT I / IV-B
JABATAN / KELAS JABATAN	:	PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN / 14
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN	:	2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	OUTPUT / OUTCOME																												%
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		JML					
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	%																							75.70		75.70			
2	Meningkatnya Kawasan Bebas Kumuh	Persentase Bebas Kumuh	%																							94.36		94.36			
CAPAIAN OUTPUT																															
% CAPAIAN KINERJA TIAP BULAN																															

NO	PROGRAM	ANGGARAN				KETERANGAN
		SEBELUM		SESUDAH		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	928.232.100,00	Rp	918.557.900,00	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	4.229.722.420,00	Rp	4.090.294.420,00	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN				KETERANGAN
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp	7.125.514.841,00	Rp	6.765.008.107,00	APBD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	1.387.298.200,00	Rp	1.358.162.372,00	APBD
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	5.651.722.800,00	Rp	5.634.499.700,00	APBD
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	20.184.565.172,00	Rp	18.416.070.073,00	APBD
JUMLAH		**Rp**	**39.507.055.533,00**	**Rp**	**37.182.592.572,00**	**APBD**

Pasuruan, 18 September 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA

ADI WIBOWO

Pihak Pertama,
PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AKUNG NOVAJANTO SODIQ NUCH, ST, MT
NIP. 19721252003121006

Lampiran 3 Matriks Renstra 5 Tahun (Periode Tahun 2021-2026)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Setelah Perubahan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan		Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	88,35%	88,50%	88,65%
2		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Bebas Kumuh	-	-	-	88,71%	90,08%	91,46%
3			Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang Layak	-	-	-	74,44%	76,28%	76,28%

Lampiran 4 Matriks Renstra 5 Tahun (Periode Tahun 2025-2029)

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kota Pasuruan

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Indeks	87,52	85,66	86,45	87,26	87,95	88,56	89,17	
2.	Persentase PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak	%	80,25	75,70	77,67	79,39	80,85	82,15	83,44	
3.	Persentase Bebas Kumuh	%	97,05	94,36	95,48	96,61	97,73	98,86	100	